

BAB III

KAJIAN HISTORIS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID

TENTANG PRIBUMISASI ISLAM

A. Konsep Pribumisasi Islam Menurut Abdurrahman Wahid

Kajian historis pemikiran Gus Dur sangat menarik untuk dikaji, termasuk gagasannya tentang pribumisasi Islam. Ditinjau dari perspektif historis sebuah pemikiran pastinya tidak muncul tanpa suatu sebab, dan pemikiran tersebut juga memiliki relevansi dan mengalami perjalanan sejarah untuk bisa oleh para intelektual dan juga masyarakat.

1. Pengertian Pribumisasi Islam

Menurut Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, pribumisasi Islam adalah upaya penyesuaian ajaran Islam dengan budaya lokal Indonesia, bukan untuk menggantikan ajaran agama dengan budaya atau sebaliknya. Untuk menjaga kebudayaan dengan tetap berpegang pada ajaran Islam berdasarkan ushul fiqh dan qaidah fiqh. Gus Dur menekankan bahwa Islam harus mampu beradaptasi dengan budaya setempat, karena tidak semua hal dapat langsung mengikuti ajaran Islam secara kaku. Proses adaptasi ini penting agar Islam

dapat berakulturasi dengan konteks Indonesia tanpa mencampurkan agama dan budaya secara membabi buta, sehingga tidak menghilangkan ciri khas agama itu sendiri.¹

Dalam pandangan Gus Dur, proses pribumisasi Islam juga dapat dilihat dalam upaya menghilangkan benturan antara Islam ortodoks yang cenderung rigid dengan realitas sosial Indonesia yang majemuk. Menurutnya, akulturasi ini bukanlah hal yang asing dalam sejarah Islam, yang sudah sejak lama mengalami interaksi dengan berbagai kebudayaan di seluruh dunia.²

Gus Dur percaya bahwa Islam tidak harus dipahami secara sempit dengan cara-cara yang didominasi oleh pandangan dunia Arab, tetapi harus memberikan ruang bagi penerimaan dan perkembangan budaya setempat, yang pada gilirannya akan memperkaya pemahaman umat terhadap ajaran Islam itu sendiri. Gus Dur menegaskan bahwa Islam yang mengedepankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan pluralisme sangat relevan dengan konteks sosial Indonesia yang *multi-ethnic* dan *multi-religious*.

¹ A. Soheh Mukarom. *Pribumisasi Islam Dalam Pandangan Abdurrahman Wahid*. Studi Agama-agama dan Lintas Budaya 2, 1 (September 2017): 63-74

² M. Amin Abdullah, *Islam dan Kebudayaan Lokal: Refleksi Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2022).

Pribumisasi Islam juga mempertimbangkan kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri, serta menjaga independensi agama dan budaya yang memiliki wilayah tumpang tindih seperti filsafat dan ilmu pengetahuan. Pada intinya, pribumisasi Islam merupakan upaya rekonsiliasi dengan kekuatan budaya lokal, di mana Islam berperan sebagai faktor komplementer bagi komponen bangsa lainnya, menciptakan harmoni antara Islam dan adat istiadat di tempat Islam tumbuh dan berkembang.³

Dalam pandangan Gus Dur, pribumisasi bukanlah sekadar upaya untuk mengadaptasi praktik keagamaan, tetapi juga merupakan cara untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Ia menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki karakteristik budaya yang unik, dan oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pemikiran Islam yang relevan dengan realitas sosial yang ada.

Gus Dur menganggap bahwa pribumisasi Islam adalah suatu proses adaptasi yang memungkinkan nilai-nilai Islam

³ Abdurrahman. Tabayun Gus Dur: *Pribumisasi Islam, Hak Mayoritas, Reformasi Kultural*. Yogyakarta: LkiS

untuk diintegrasikan dengan tradisi dan budaya lokal, sehingga menciptakan ruang bagi praktik keagamaan yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat lokal. Dalam kerangka pikirnya, agama dan budaya memiliki independensi masing-masing; agama bersifat normatif dan permanen, sementara budaya bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, tumpang tindih antara agama dan budaya dapat memperkaya kehidupan beragama masyarakat, menciptakan harmoni antara yang normatif dan yang kontekstual.⁴

Salah satu contoh konkret dari pribumisasi Islam bisa dilihat pada arsitektur masjid Demak, yang mengadopsi elemen-elemen lokal dalam desainnya. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol interaksi antara ajaran Islam dan tradisi lokal, yang menunjukkan bahwa Islam dapat berakar kuat tanpa kehilangan identitas budaya setempat. Gus Dur juga menekankan bahwa pribumisasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama. Ini berarti bahwa meskipun hukum Islam tetap berlaku,

⁴ Abdurrahman Wahid. *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*, Jakarta, 1989.
<https://gusdur.net/pribumisasi-islam/>

aplikasinya dapat disesuaikan dengan konteks budaya yang ada, sehingga lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Selain itu, Gus Dur secara tegas menolak konsep Arabisasi, yang sering kali identik dengan pengenalan simbol-simbol budaya Arab dalam praktik Islam. Ia berargumen bahwa Islam harus tetap berakar pada budaya lokal agar tidak kehilangan identitasnya. Dalam pandangannya, keberagaman budaya yang ada di Indonesia seharusnya dipandang sebagai kekayaan, bukan sebagai penghalang untuk menjalankan ajaran Islam. Dengan demikian, pribumisasi Islam menjadi penting sebagai upaya untuk menciptakan Islam yang inklusif, yang mampu menjawab tantangan-tantangan sosial dan budaya di Indonesia.⁵

1. Latar belakang atau asal-usul pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pribumisasi Islam

Sebagai tokoh intelektual dan pemimpin umat Islam di Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam di tanah air. Pemikiran Wahid banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan sosial yang ia jalani. Sebagai seseorang yang tumbuh dalam keluarga

⁵ Azyumardi Azra, "Gus Dur dan Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2006).

pesantren yang sangat tradisional, di satu sisi ia juga menyadari pentingnya transformasi sosial dan kultural dalam menghadapi tantangan zaman.⁶

Wahid tidak hanya mengedepankan aspek keagamaan yang normatif, tetapi juga memberi ruang bagi kebebasan berpikir dalam memahami ajaran Islam. Pengalamannya yang luas dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan masyarakat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, membentuk pandangannya yang lebih inklusif dan moderat. Sebagai contoh, dalam pandangan Gus Dur, Islam tidak hanya untuk kalangan tertentu, tetapi dapat diterima dalam berbagai konteks sosial dan budaya.

Pemikiran Gus Dur terkait dengan Pribumisasi Islam sangat berakar pada pengalaman sosial Indonesia yang sangat majemuk. Di satu sisi, Gus Dur merasa bahwa Islam harus dapat diadaptasi dengan konteks budaya lokal Indonesia, yang berbeda jauh dengan budaya Timur Tengah. Ia melihat bahwa banyak ajaran Islam yang harus dipahami dalam kerangka lokalitas Indonesia. Sebagai contoh, dalam upaya

⁶ Abdurrahman Wahid, *Pengalaman Hidup Gus Dur: Sebuah Autobiografi* (Jakarta: Mizan, 2006).

memperjuangkan hak-hak minoritas dan keadilan sosial, Wahid sering mengingatkan pentingnya penerimaan terhadap pluralitas budaya dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini tampak dalam usaha Gus Dur untuk mengharmoniskan Islam dengan nilai-nilai lokal seperti kebersamaan, gotong royong, dan toleransi yang menjadi bagian dari tradisi bangsa Indonesia. Bagi Gus Dur, pribumisasi Islam bukanlah sekadar adaptasi budaya, melainkan sebuah proses dialog antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai budaya lokal yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.⁷

Kritik Gus Dur terhadap pemikiran Islam yang kaku dan dogmatis tercermin dalam pandangannya yang membuka ruang untuk tafsir (penafsiran) yang lebih bebas dan plural. Salah satu hasil pemikirannya yang banyak menjadi sorotan adalah penekanannya terhadap pentingnya *Islam Nusantara*, sebuah konsep yang menekankan peran Islam yang lebih ramah terhadap budaya lokal Indonesia dan keragaman etnis serta agama yang ada. Hal ini menandai pembaruan dalam cara umat Islam Indonesia memahami dan menjalankan ajaran agama

⁷ Haryanto Sastrosoeyoso, "Islam, Demokrasi, dan Pluralisme menurut Gus Dur," *Jurnal Politik Islam* 5, no. 2 (2008).

dengan tetap mempertahankan keunikan dan kekayaan budaya Indonesia.⁸

2. Prinsip-Prinsip Pribumisasi Islam

Prinsip-prinsip pribumisasi Islam yang diusulkan oleh Gus Dur, Abdurrahman Wahid, merupakan sebuah upaya untuk mengadaptasi ajaran Islam dengan kondisi budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Gagasan ini sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam Al-Qur'an, seperti yang terdapat pada QS, Al-Hujurat [49]:13

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا
وَقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
خَبِيْرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.⁹

Ayat ini mendukung prinsip dasar *Pribumisasi Islam* bahwa keragaman budaya dan etnis adalah ciptaan Allah, bukan

⁸ Gusdurian, "Islam Nusantara: Sebuah Warisan Gus Dur," Gusdurian.net, 2016, <https://gusdurian.net> (diakses 12 Februari 2025).

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), Juz 26, hal. 983.

ancaman. Di dalam ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal, bukan untuk saling menyeragamkan. Ayat ini menegaskan bahwa keberagaman adalah sunnatullah yang harus dihargai, yang juga menjadi inti dari gagasan inklusivitas Gus Dur dalam memandang masyarakat plural. Maka, Islam tidak harus menghapus identitas lokal, tapi justru menghargainya selama sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan.

Gus Dur melihat bahwa Islam harus bisa berkembang secara harmonis dengan kearifan lokal, tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Salah satu prinsip utama yang diusungnya adalah penekanan pada nilai inklusivitas, yang mencakup pemahaman Islam yang ramah terhadap keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Gus Dur percaya bahwa Islam dapat hidup berdampingan dengan berbagai budaya dan tradisi lokal yang ada, sepanjang prinsip-prinsip ajaran Islam tidak dilanggar. Inklusivitas ini

menciptakan ruang bagi pluralisme dalam masyarakat Indonesia.¹⁰

Dengan demikian, ketiga prinsip Pribumisasi Islam sebagaimana Yang dirumuskan oleh Gus Dur menunjukkan bahwa Islam tidak harus eksklusif dan kaku, akan tetapi islam harus dapat bersanding harmonis dengan tradisi lokal yang ada di Indonesia, hal ini memberikan ruang bagi pluralisme, dan senantiasa terbuka terhadap perubahan sosial melalui ijtihad. Nilai-nilai Pribumisasi Islam tersebut tentunya sejalan dengan pesan-pesan universal yang terkandung dalam QS. Al-Māidah:48 tentang syariat yang kontekstual.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
 الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
 تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
 وَمِنْهَا جَاءَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي
 مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

¹⁰ Abdurrahman Wahid, *Islam Nusantara: A View from the Indonesian Archipelago* (Bandung: Mizan, 2016).

Artinya: Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan."¹¹

Serta QS. An-Nahl:36 yang menegaskan bahwa setiap umat memiliki utusan dan konteksnya masing-masing.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ ۗ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!” Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka, berjalanlah kamu di bumi dan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm. 141.

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul)"¹²

Gagasan Gus Dur menunjukkan bahwa Pribumisasi Islam bukan sekadar strategi budaya, tetapi juga cerminan dari prinsip-prinsip etis Islam yang mendalam. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam pendekatan Gus Dur terhadap masyarakat yang berbeda agama dan budaya. Misalnya, ketika Gus Dur menjadi Presiden, ia selalu menekankan pentingnya toleransi antar umat beragama. Di Indonesia, yang dikenal dengan keberagaman etnis dan agama, Gus Dur mendorong agar umat Islam tidak melihat perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari rahmat yang harus dihargai. Gus Dur menganggap bahwa Islam di Indonesia tidak bisa dipaksakan mengikuti cara-cara yang sama seperti di Timur Tengah, karena karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat plural. Hal ini terlihat dalam kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan umat beragama serta pengakuan terhadap berbagai kebudayaan lokal yang berakar pada tradisi masyarakat Indonesia. Dalam pidatonya yang disampaikan pada pertemuan "*World*

¹² Ibid., hlm. 416..

Conference on Religion and Peace" di Kyoto, Jepang, Gus Dur menegaskan bahwa keragaman adalah keniscayaan yang harus dihargai sebagai bagian dari iman yang sejati.¹³

Prinsip kedua yang diusulkan oleh Gus Dur dalam pribumisasi Islam adalah penghormatan terhadap tradisi lokal. Gus Dur menganggap bahwa Islam harus bisa berbaur dengan budaya setempat dan tidak harus menghapuskan identitas budaya lokal. Sebagai contoh, di banyak daerah di Indonesia, budaya Islam telah bercampur dengan tradisi-tradisi lokal seperti dalam upacara adat, seni, dan arsitektur. Gus Dur mendorong umat Islam untuk memahami bahwa Islam tidak harus bersifat kaku dan steril dari tradisi, tetapi bisa berkembang dengan mengintegrasikan budaya lokal, seperti dalam seni kaligrafi, arsitektur masjid yang mencerminkan budaya setempat, dan penggunaan bahasa daerah dalam dakwah. Dalam tulisannya "*Islam dan Kebudayaan*," Gus Dur dengan jelas menyatakan bahwa Islam tidak perlu bertentangan dengan kebudayaan lokal.¹⁴

¹³ A. Wahid: *Islam and Democracy Former President of Indonesia Delivered at IIFWP World Summit of Muslim Leaders, 2001*
<https://archive.upf.org/resources/speeches-and-articles/1015-islam-and-democracy>

¹⁴ Abdurrahman. *Tradisi dan Modernitas dalam Islam*. Jakarta: GusDur.net. 1999

Contoh nyata penerapan prinsip ini adalah keberadaan tradisi Islam yang sangat kuat di beberapa daerah, seperti di Jawa dengan tradisi "selamatan" yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Gus Dur tidak melihat tradisi ini sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, justru ia menilai bahwa tradisi ini bisa menjadi medium untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Prinsip pribumisasi Islam yang diusulkan Gus Dur juga mencakup pengakuan terhadap tradisi seperti "wayang kulit" atau "gamelan" yang telah lama ada di Indonesia. Gus Dur percaya bahwa tradisi-tradisi ini bisa dijadikan sarana untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam secara lebih halus dan diterima oleh masyarakat.¹⁵

Prinsip ketiga dalam pribumisasi Islam versi Gus Dur adalah pentingnya pembaruan atau ijtihad. Gus Dur menekankan bahwa Islam harus bisa memberikan ruang untuk berpikir kritis dan melakukan interpretasi ulang terhadap ajaran-ajaran yang ada, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya yang terus berkembang. Dalam hal ini, Gus Dur

¹⁵Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), <https://archive.org/details/abdurrahman-wahid-menggerakkan-tradisi-esai-esai-pesantren-2001/page/n1/mode/2up>, diakses 12 Februari 2025.

banyak mengedepankan nilai-nilai kontekstual dalam memahami ajaran-ajaran agama. Menurutnya, Islam tidak bisa stagnan dan harus bisa beradaptasi dengan dinamika zaman dan tantangan baru yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu, Gus Dur mendorong umat Islam untuk lebih terbuka terhadap pemikiran-pemikiran baru yang tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Gus Dur juga menekankan pentingnya kebebasan berfikir dalam Islam dan perlunya ijtihad yang mampu menjawab tantangan zaman.¹⁶

Penerapan prinsip pembaruan ini terlihat jelas dalam kebijakan Gus Dur yang memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan berpikir. Misalnya, dalam mendukung kebebasan pers dan kebebasan beragama, Gus Dur berupaya agar umat Islam di Indonesia tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang konservatif dan dogmatis. Gus Dur berani menantang pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan norma tradisional tanpa adanya ruang untuk perubahan. Gus Dur menginginkan agar umat Islam bisa menjalankan ajaran agama dengan cara yang lebih terbuka,

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Islam dan Pembaharuan: Proyek Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

berbasis pada pemikiran kritis, dan mampu menjawab tantangan zaman. Gus Dur juga mengungkapkan dalam bukunya *"Dari Pesantren ke Gedung Putih: Politik Islam dan Pluralisme"* bahwa kebebasan beragama adalah aspek penting dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab.¹⁷

3. Relevansi pribumisasi Islam dalam konteks Indonesia

Pribumisasi dalam konteks Indonesia merujuk pada penyesuaian kebudayaan, sistem sosial, dan politik asing dengan konteks lokal Indonesia, terutama dalam menghadapi dominasi budaya atau kebijakan kolonial dan internasional. Proses ini penting untuk menjaga identitas budaya bangsa, memperkuat kemandirian, serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kehidupan sosial dan sistem pemerintahan. Dalam hal ini, pribumisasi menjadi sebuah strategi untuk memperkuat keberagaman budaya Indonesia agar tetap dapat bertahan di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.¹⁸

Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur, menggaris bawahi pentingnya menjaga identitas budaya Indonesia sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni budaya asing. Menurut Gus Dur,

¹⁷ Abdurrahman W. *Dari Pesantren ke Gedung Putih: Politik Islam dan Pluralisme*, 2004.

¹⁸ Syafiq Hasyim. *"Islam dan Demokrasi: Perspektif Abdurrahman Wahid."* *Jurnal Politik dan Kebudayaan*, vol. 25, no. 2, 2000, pp. 35.

Indonesia perlu memastikan bahwa pengaruh-pengaruh luar disesuaikan dengan nilai-nilai lokal yang telah ada, agar tidak menghilangkan jati diri bangsa. Pribumisasi, dalam pandangannya, menjadi kunci untuk merawat dan mengembangkan kebudayaan nasional yang tetap menghargai dan melibatkan kekayaan lokal tanpa mengabaikan kemajuan zaman.¹⁹

Dalam pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pribumisasi memiliki relevansi besar dalam penguatan kemandirian nasional. Gus Dur menekankan pentingnya Indonesia untuk menghindari ketergantungan pada negara-negara besar dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ia berpendapat bahwa dengan menjalankan pribumisasi, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan dan kebijakan yang lebih mandiri, berpijak pada kekayaan lokal, dan tidak terjebak dalam pengaruh asing yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu Ilahi dan memiliki seperangkat norma yang bersifat normatif. Karena karakter normatif tersebut, ajaran agama cenderung

¹⁹ Azyumardi Azra and Syafiq Hasyim. "Islam, Pluralisme dan Demokrasi," In Politik Islam dan Demokrasi: Perspektif Abdurrahman Wahid, Jakarta: LP3ES, 2000, hlm 35

bersifat tetap dan tidak berubah. Sebaliknya, budaya merupakan produk manusia yang senantiasa berkembang mengikuti dinamika zaman, sehingga bersifat fleksibel dan berubah-ubah. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, agama dan budaya tidak saling meniadakan; justru ekspresi keagamaan sering kali mengambil bentuk budaya. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai manifestasi budaya religius, seperti tarian seudati, gaya hidup santri, serta tradisi penghormatan kepada kiai. Elemen-elemen budaya tersebut mengandung nilai-nilai agama yang diterima secara langsung oleh masyarakat tanpa selalu mempersoalkan dasar-dasar teologisnya. Bahkan, di kalangan umat Islam abangan, terdapat kepatuhan terhadap nilai-nilai moral seperti menjauhi praktik 'ma lima' (mabuk, berjudi, mencuri, perbuatan amoral, dan penggunaan narkoba), yang menunjukkan internalisasi nilai agama dalam bentuk budaya lokal.²⁰

Selain itu, Gus Dur melihat pribumisasi sebagai langkah untuk memperkuat demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Dalam era yang semakin majemuk, pribumisasi membantu

²⁰ Islam Nusantara, *Manifesto Proses Pribumisasi Islam*, NU Online 3 April 2017. Sumber: <https://nu.or.id/daerah/islam-nusantara-manifesto-proses-pribumisasi-islam-0XIIU>

memastikan bahwa kebijakan negara dapat mencerminkan keragaman etnis, agama, dan budaya Indonesia. Gus Dur berpendapat bahwa dengan mengedepankan toleransi dan dialog antarbudaya, pribumisasi akan memperkuat fondasi masyarakat Indonesia yang inklusif, di mana perbedaan dihargai dengan baik.

Dalam konteks inilah Islam Pribumi ingin membebaskan puritanisme dan segala bentuk purifikasi dalam Islam sekaligus juga menjaga kearifan lokal tanpa menghilangkan identitas normatif. Karena itulah, Islam Pribumi lebih berideologi kultural yang terbesar (*spread cultural ideology*) yang mempertimbangkan perbedaan lokalitas ketimbang ideologi kultural yang memusat, dan mengakui ajaran agama tanpa interpretasi, sehingga dapat tersebar di berbagai wilayah tanpa merusak kultur lokal masyarakat setempat.

Perdebatan mengenai konsep Islam pribumi merupakan hal yang tak terelakkan. Namun, sebagaimana diakui oleh Abdurrahman Wahid sendiri, ia bukanlah tokoh pertama yang mengagas pendekatan tersebut. Gus Dur memosisikan dirinya sebagai penerus dari strategi kultural yang sebelumnya telah

diterapkan oleh Wali Songo. Melalui pendekatan pribumisasi, Wali Songo dinilai berhasil menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa secara damai, tanpa harus berbenturan secara frontal dengan budaya lokal. Strategi ini dinilai berperan penting dalam membentuk karakter Islam yang inklusif dan dinamis dalam konteks keindonesiaan. Dengan mengedepankan pendekatan yang menghormati kebudayaan lokal dan mengedepankan prinsip-prinsip toleransi serta moderasi, Gus Dur berhasil membangun wacana baru yang lebih kontekstual bagi umat Islam Indonesia. Pemikiran pribumisasi Islam ini turut memperkuat posisi Islam di tengah keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia.²¹

Secara keseluruhan, konsep pribumisasi Islam yang digagas oleh Gus Dur mengajarkan kita bahwa Islam bisa berkembang dengan cara yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya tanpa harus kehilangan esensinya sebagai agama universal.

B. Diskursus Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid Tahun

1980-1998

Dalam kerangka sejarah pemikiran sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo, studi terhadap pemikiran tidak

²¹ Muhammad Zidni Nafi, "Kiprah Islam Nusantara dalam Kemerdekaan Indonesia," *NU Online*, 9 September 2015, <https://svr.nu.or.id/opini/kiprah-islam-nusantara-dalam-kemerdekaan-indonesia-mVnZF>, diakses 12 Februari 2025.

cukup hanya memahami ide sebagai teks tertulis, tetapi juga harus menempatkan ide tersebut dalam konteks sejarah serta bagaimana ia berpengaruh terhadap kehidupan nyata masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemikiran Gus Dur mengenai Pribumisasi Islam dapat dipahami bukan sekadar sebagai gagasan abstrak, melainkan sebagai respons intelektual atas situasi sosial-politik dan dinamika keislaman Indonesia sejak tahun 1980-an hingga awal abad ke-21. Pribumisasi Islam dalam hal ini mencerminkan ikhtiar Gus Dur untuk menjembatani nilai-nilai universal Islam dengan realitas lokal Indonesia, melalui proses yang berlangsung dalam dua fase sejarah pemikiran: periode 1980–1998 yang diwarnai oleh dominasi rezim Orde Baru dan transformasi intelektual Gus Dur sebagai pemikir dan budayawan, serta periode 1998–2009 yang menunjukkan ekspresi lebih terbuka pasca-reformasi, termasuk melalui kapasitasnya sebagai Presiden.

Dalam pendekatan sejarah pemikiran ini sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo, pemikiran seseorang tidak hanya dikaji dari segi teks atau gagasan yang ia hasilkan, tetapi juga harus dilihat dari konteks sejarah yang melatarbelakangi munculnya ide tersebut, serta bagaimana gagasan itu berinteraksi

dan memengaruhi masyarakat luas.²² Ketiga pendekatan ini dapat diterapkan dalam menganalisis pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap diskursus pribumisasi Islam dalam dua fase ini berusaha untuk mencerminkan tiga pendekatan sejarah pemikiran: teks (gagasan Gus Dur), konteks sejarah (kondisi sosial-politik Indonesia), serta relasi pemikiran tersebut dengan masyarakat luas (resonansi ide dalam kehidupan umat). Pertama, dari sisi teks, Gus Dur secara eksplisit mengembangkan konsep Pribumisasi Islam melalui berbagai tulisan, ceramah, dan wawancara sejak awal 1980-an. Dalam artikelnya yang berjudul “Pribumisasi Islam,” Gus Dur menjelaskan bahwa Islam sebagai ajaran bersifat universal, namun bentuk kulturalnya tidak harus identik dengan budaya Arab.²³ Islam menurut Gus Dur, justru harus hadir melalui budaya lokal agar dapat berakar kuat di masyarakat Indonesia. Kedua, dari segi konteks sejarah, gagasan ini lahir di tengah situasi politik Orde Baru yang mengekang ekspresi keagamaan dan dalam suasana ketegangan antara kelompok Islamis dan

²² Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

²³ Abdurrahman Wahid, “Pribumisasi Islam,” dalam *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: Wahid Institute & LKiS, 2007), hlm. 267.

nasionalis. Pribumisasi Islam menjadi respons terhadap tantangan formalisme Islam dan upaya Gus Dur untuk meneguhkan Islam yang inklusif serta sejalan dengan nasionalisme Indonesia. Pada era pasca-reformasi (1998–2009), gagasan ini semakin berkembang seiring meningkatnya ruang kebebasan sipil dan peran Gus Dur sebagai Presiden RI, yang menjadikan nilai-nilai tersebut dasar etik dalam kebijakan kebangsaan.

Ketiga, dari aspek relasi dengan masyarakat, Pribumisasi Islam tidak berhenti sebagai wacana elit, melainkan terus tumbuh dan membentuk praktik sosial melalui jaringan pesantren, Nahdlatul Ulama, dan komunitas Gusdurian. Nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan penghargaan terhadap budaya lokal menjadi semangat yang dihidupi oleh banyak kalangan hingga hari ini. Dengan demikian, pemikiran Gus Dur tentang Pribumisasi Islam mencerminkan kekuatan ide yang hidup dalam teks, teruji oleh konteks, dan relevan dalam praksis sosial.

Dengan kerangka sejarah pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa gagasan Pribumisasi Islam Gus Dur berkembang seiring dinamika zaman dan menjangkau masyarakat luas. Selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada dua fase utama perkembangan

gagasan tersebut, dimulai dari fase pertama pada periode 1980 hingga 1998.

Fase pertama untuk menganalisis diskursus Pribumisasi Islam yakni pada tahun (1980–1998), karena pada tahun tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks politik Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada masa ini, negara cenderung mengekang ekspresi keagamaan yang dianggap bisa mengancam stabilitas politik atau menyimpang dari garis ideologi pembangunan nasional. Orde Baru menaruh curiga terhadap aktivisme Islam politik dan lebih mendukung model Islam yang privat dan apolitis. Dalam situasi tersebut, Gus Dur justru mengembangkan gagasan Pribumisasi Islam sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap dua arus besar: pertama, arabisasi atau islamisasi kultural yang menolak budaya lokal; kedua, kontrol negara yang menekan dinamika keberagaman masyarakat.

Gus Dur menolak pemaksaan bentuk-bentuk keislaman yang tidak sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia, sekaligus mengkritik keras pendekatan rezim Soeharto yang mengendalikan ormas Islam dan membatasi diskursus kritis dalam masyarakat sipil. Melalui pendekatan kultural, Gus Dur mengemas

Pribumisasi Islam sebagai proyek kebudayaan yang tidak secara langsung berbenturan dengan kekuasaan, tetapi secara substansial tetap membawa pesan pembebasan dan pluralisme. Dengan demikian, wacana Pribumisasi Islam menjadi saluran alternatif untuk mengembangkan pemikiran keislaman yang kontekstual dan inklusif, meskipun berada di bawah bayang-bayang negara yang otoriter.²⁴

Pada akhir 1980-an, Gus Dur mencetuskan gagasan *pribumisasi Islam*, yang menekankan pentingnya menyesuaikan ajaran Islam universal dengan budaya lokal Nusantara agar tidak terjebak dalam arabisasi yang dianggap mencabut akar kultural umat Islam Indonesia.

Pribumisasi Islam adalah cara Gus Dur khususnya dan NU umumnya untuk menolak Arabisasi. Tapi ini juga bukan pikiran baru yang datang dari Gus Dur, karena sejak dulu para kiai pesantren sudah punya kecenderungan untuk menghadirkan jenis keislaman yang khas Indonesia, tanpa banyak dicampur unsur Arabisme. Jadi, pribumisasi Islam hanya stempelnya saja. Gus Dur berjasa menteorikan-nya. Gus Dur telah memberi nama

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 22

terhadap jenis perjuangan yang dilakukan oleh para ulama Indonesia sejak Wali Songo sampai sekarang.

Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang pribumisasi Islam yakni bagian dari wacana besar mengenai bagaimana Islam seharusnya berinteraksi dengan budaya dan tradisi lokal di Indonesia. Gus Dur, sebagai seorang intelektual dan tokoh agama yang sangat dihormati, memperkenalkan konsep pribumisasi Islam untuk menjawab tantangan pemahaman dan praktik Islam di tengah keberagaman budaya Indonesia. Fenomena pribumisasi Islam, sebagaimana yang dikembangkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terutama terjadi sejak akhir 1980-an hingga awal 2000-an. Pemikiran ini berkembang sebagai respons Gus Dur terhadap tantangan sosial, budaya, dan politik yang dihadapi umat Islam di Indonesia pada masa itu. Proses pribumisasi Islam ini lebih menekankan pada integrasi ajaran Islam dengan budaya lokal Indonesia, dengan tujuan menjadikan Islam relevan dan lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang multikultural dan majemuk.²⁵

²⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: Mizan, 1994), hlm 23

Pemikiran Gus Dur mengenai pribumisasi Islam mulai berkembang seiring dengan dinamika sosial dan politik di Indonesia yang cukup kompleks. Gus Dur berupaya untuk mengembangkan bentuk Islam yang dapat hidup berdampingan dengan budaya lokal Indonesia, serta menciptakan harmoni di tengah keragaman sosial dan agama yang ada. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai diskursus terkait pribumisasi Islam pada periode Konteks Sosial dan Politik Indonesia pada 1980-1998.²⁶

Pada 1980-an, Indonesia menghadapi ketegangan yang cukup besar antara kelompok Islam tradisional dan kelompok Islam modernis. Islam tradisional banyak diwakili oleh organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), yang pada saat itu dipimpin oleh Gus Dur. NU mengajarkan Islam dengan cara yang lebih kontekstual, menghargai budaya lokal, serta lebih mengedepankan pendekatan tasawuf dan pemahaman yang tidak terlalu kaku terhadap teks-teks keagamaan.

Di sisi lain, kelompok Islam modernis yang dipengaruhi oleh gerakan Islam internasional, seperti Wahhabi dan Salafi.

²⁶ Muhammad Rifa'I. *Islam Nusantara Perspektif Abdurrahman Wahid pemikiran dan epistemologi*. Yogyakarta: Literasi nusantara, 2006, hlm 37

Mereka menekankan perlunya mengikuti ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang diyakini sebagai "praktik Islam yang murni," yang seringkali dianggap mengabaikan adat dan budaya lokal. Kelompok ini lebih cenderung menganggap bahwa cara-cara yang dilakukan oleh kelompok Islam tradisional adalah bid'ah (sesat) atau tidak sesuai dengan ajaran Islam yang asli.²⁷

Konflik ini memperburuk polarisasi dalam tubuh umat Islam di Indonesia, yang berpotensi merusak kerukunan antarumat beragama dan memperburuk hubungan sosial di masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Sebagai pemimpin NU, Gus Dur memandang bahwa perlu ada suatu pendekatan yang lebih inklusif terhadap Islam di Indonesia, yang dapat mengakomodasi keragaman budaya dan tidak terjebak dalam ketegangan antara tradisi dan modernitas.

Beberapa aspek penting dari pemikiran Gus Dur tentang pribumisasi Islam pada periode ini adalah.

1. Islam yang Tidak Dogmatis

Gus Dur menekankan bahwa Islam yang hidup di Indonesia harus bersifat fleksibel dan dinamis, tidak

²⁷ KH. Abdurrahman Wahid. *Memahami Islam dan tantangan Modernisasi*. Gus Dur. Net <https://gusdur.net/memahami-islam-dan-tantangan-modernisasi/>

terikat pada interpretasi yang rigid atau dogmatis. Islam, menurut Gus Dur, seharusnya tidak hanya diterima dalam bentuk yang tekstual atau diturunkan secara langsung dari ajaran yang berasal dari Timur Tengah, tetapi juga harus dapat berinteraksi dengan budaya lokal Indonesia yang penuh dengan kekayaan tradisi dan adat. Dengan demikian, Gus Dur mengusulkan Islam yang kontekstual, di mana ajaran agama bisa dipahami dan diterima sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.²⁸

2. Menerima Keragaman Budaya Indonesia

Gus Dur percaya bahwa budaya lokal Indonesia yang beragam bukanlah halangan bagi penerimaan Islam. Sebaliknya, budaya Indonesia bisa menjadi tempat yang subur untuk mengembangkan ajaran Islam dengan cara yang lebih damai dan harmonis. Konsep Islam Nusantara yang dikembangkan Gus Dur dalam kerangka pribumisasi Islam menekankan bahwa Islam Indonesia harus menghormati dan berinteraksi dengan

²⁸ Gus Dur: *Islam hadir untuk memperkuat dan menyempurnakan tradisi yang baik. Bukan Meng-Arab-kan, Pesan Gus Dur soal Relasi Islam dan Budaya Lokal Indonesia*. Liputan 20 <https://www.liputan6.com/islami/read/5664465/bukan-meng-arab-kan-pesan-gus-dur-soal-relasi-islam-dan-budaya-lokal-indonesia?page=2>

adat-istiadat lokal, seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai keberagaman. Dalam pandangan Gus Dur, budaya Indonesia tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tapi mengimplementasikan nilai-nilai Islam.²⁹

3. Menghindari Kecenderungan Puritanisme

Gus Dur sangat kritis terhadap kecenderungan puritanisme yang berkembang pada waktu itu, yang sering kali mengabaikan keberagaman budaya dan tradisi lokal. Ia melihat bahwa pendekatan Islam yang terlalu puritan dan tekstual, seperti yang dipromosikan oleh kelompok Salafi dan Wahhabi, tidak cocok diterapkan dalam konteks Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, bahasa, dan adat istiadat. Gus Dur berpendapat bahwa Islam yang dibawa ke Indonesia harus mampu berdialog dengan budaya-budaya lokal tanpa harus menghilangkan identitas Islam itu sendiri.

4. Pluralisme dan Toleransi

²⁹ Abdurrahman Wahid, Ahmad Baso, dan K.H. Salahuddin Wahid, *Gus Dur and Islam Nusantara: Exploring Peaceful Islamic Values* (Jakarta: Wahid Institute Press, 2020), hlm. 15.

Gus Dur adalah seorang tokoh yang sangat menjunjung tinggi pluralisme. Pada masa ini, ia sering menekankan bahwa Islam di Indonesia harus dipahami dalam kerangka pluralisme, yang berarti menerima perbedaan agama, suku, dan budaya dengan penuh toleransi. Gus Dur mendorong umat Islam Indonesia untuk membuka diri terhadap pemahaman dan praktik agama lain tanpa merendahkan mereka. Ia mengajarkan bahwa Islam yang dibawa ke Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

a. Pluralisme dan Toleransi: Gus Dur sangat mendukung pluralisme dan keberagaman. Ia melihat bahwa Islam di Indonesia harus diterima dalam keberagaman agama, budaya, dan adat yang ada. Pribumisasi Islam menjadi sarana untuk mengakomodasi berbagai perbedaan ini tanpa mengorbankan kesatuan dan esensi ajaran Islam.³⁰

³⁰ Zainal Abidin. *Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Pluralitas*. Skripsi Sarjana, Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara (BINUS), 2020.

- b. Islam yang Ramah Terhadap Tradisi Lokal: Gus Dur berpendapat bahwa Islam haruslah ramah terhadap tradisi lokal. Islam Indonesia harus memberi ruang bagi ekspresi budaya lokal tanpa mengharuskan penyesuaian yang terlalu ketat terhadap norma-norma yang datang dari luar, terutama yang berasal dari Timur Tengah. Misalnya, Gus Dur mengapresiasi praktik-praktik keagamaan lokal seperti tahlilan, selamatan, dan zikir yang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia.
- c. Kritik terhadap Fanatisme: Gus Dur menentang fanatisme dalam bentuk apapun, baik itu fanatisme agama maupun fanatisme budaya. Ia mengajarkan pentingnya moderasi dalam beragama dan memperkenalkan cara beragama yang menghargai perbedaan dan lebih mengutamakan kesederhanaan serta kedamaian.
- d. Islam sebagai Agama Kemajuan: Gus Dur juga melihat Islam sebagai agama yang mendorong kemajuan, bukan stagnasi. Ia menekankan bahwa

pribumisasi Islam juga berarti menghidupkan Islam sebagai agama yang bisa berkembang dan menyesuaikan dengan tantangan zaman serta konteks sosial-politik Indonesia.

Pada tahun 1998, pemikiran Gus Dur tentang Pribumisasi Islam mengalami penguatan dan perluasan makna, sekaligus menjadi kelanjutan dari gagasan-gagasan yang telah ia rintis sejak dekade 1980-an. Beberapa poin penting gagasan pribumisasi Islam pada tahun 1998, diantaranya sebagai berikut.

1. Penguatan Pluralisme dan Perlindungan Minoritas

Tahun 1998 menjadi titik penting di mana Gus Dur secara terbuka menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap kelompok minoritas (agama, etnis, dan budaya), sejalan dengan prinsip Pribumisasi Islam yang menghargai kearifan lokal dan keberagaman. Ini merupakan perluasan dari gagasan toleransi budaya yang sudah ia gaungkan sejak 1980-an.³¹

2. Dekonstruksi Arabisasi dan Fundamentalisme.

Pasca-reformasi, Gus Dur semakin vokal menolak dominasi simbol-simbol Arab dalam praktik keislaman Indonesia. Ia

³¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 58.

menyampaikan bahwa Islam di Indonesia harus punya wajah sendiri. Ini merupakan lanjutan dari kritiknya di tahun 1980-an terhadap arabisasi yang tidak kontekstual.

3. Penerimaan atas Tradisi dan Budaya Lokal

Pada 1998 dan setelahnya, Gus Dur semakin menegaskan bahwa praktik-praktik keagamaan lokal seperti tahlilan, ziarah kubur, dan tradisi pesantren merupakan ekspresi sah Islam Indonesia. Ini adalah kelanjutan langsung dari kerangka Pribumisasi Islam yang sejak awal bertujuan menjadikan budaya lokal sebagai media ekspresi keislaman.

4. Islam sebagai Rahmatan lil Alamin dalam Konteks Indonesia

Pada masa ini, Gus Dur banyak menekankan bahwa Islam yang membumi bukan hanya toleran, tapi juga aktif menjaga perdamaian sosial. Nilai “rahmah” itu tidak abstrak, tapi harus terwujud dalam perlindungan rakyat kecil dan budaya lokal.³²

Dengan demikian, aspek-aspek pemikiran Gus Dur pada tahun 1998 tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bentuk penguatan dari prinsip-prinsip dasar Pribumisasi Islam yang telah ia bangun secara konsisten sejak dekade 1980-an. Untuk menunjukkan

³² Rumadi Ahmad, *Islam Yes, Partai Islam No: Wacana Politik Islam Gus Dur* (Depok: Komunitas LKiS & The Wahid Institute, 2004), 77.

kesinambungan historis dan pengembangan gagasannya, berikut ini disajikan tabel yang merangkum sejumlah karya penting Gus Dur terkait Pribumisasi Islam dari tahun 1981 hingga 1998:

Tabel 3.1 Diskursus Pribumisasi Islam tahun 1980-1998

No	Judul	Waktu	Isi Singkat	Penerbit/media
1.	Kebangkitan Islam sebagai Titik Tolak Kebangkitan Umat	16 Februari 1981	Makalah ini membahas pentingnya kebangkitan islam sebagai fondasi perbaikan umat Islam Indonesia secara sosial dan kultural	Duskusi training HMI Badko Jawa Barat ³³
2.	Muslim di tengah pergumulan	1981	Buku yang memuat pandangan Gus Dur mengenai pribumisasi Islam	Lappenas Jakarta ³⁴
3.	Salahkah Jika Dipribumikan?	16 Juli 1983	Gus Dur mengkritik arabisasi Islam dan menekankan pentingnya adaptasi Islam terhadap budaya lokal	Majalah Tempo No. 20 Th. XIII. ³⁵
4.	Masa Islam	Ekstra	Menjelaskan	Majalah

³³ Abdurrahman Wahid, “Kebangkitan Islam Sebagai Titik Tolak Kebangkitan Umat” (Makalah, Diskusi Training HMI Badko Jawa Barat, 16 Februari 1981).

³⁴ Abdurrahman Wahid, *Muslim di Tengah Pergumulan* (Jakarta: LAPPENAS, 1981), tidak diterbitkan secara luas.

³⁵ GusDur.Net - 1983 - *Salahkah Jika Dipribumikan?*. Diakses 12 mei 2025

	dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa	Edisi 1984	pentingnya posisi Islam dalam negara pluralistik dan penerimaan Pancasila	Prisma Ekstra. ³⁶
5.	Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama	Mei 1985	Islam tidak perlu dijadikan ideologi negara, namun bisa memberi kontribusi moral secara kultura	Majalah Aula (NU). ³⁷
6.	Merelevansikan Bukannya Menghilangkan	Agustus 1987	Budaya lokal direlevansikan, bukan dihapus; inilah esensi dari pribumisasi Islam. ³⁸	Majalah Amanah.
7.	Islam Indonesia Menatap Masa Depan	1989	Kumpulan tulisan dan wawancara Gus Dur termasuk konsep Pribumisasi Islam secara mendalam	Penerbit P3M. ³⁹
8.	Islam and Pancasila: Development of	25 Agustus 1990	Gus Dur menguraikan perkembangan	Dialogue Group 9, Seoul, Korea. ⁴⁰

³⁶ Abdurrahman Wahid, *"Masa Islam dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa,"* Majalah Prisma Ekstra, 1984, Jakarta: LP3ES.

³⁷ Abdurrahman Wahid, *"Merumuskan Hubungan Ideologi Nasional dan Agama,"* Aula, Mei 1985.

³⁸ Abdurrahman Wahid, *"Merelevansikan Bukannya Menghilangkan,"* Majalah Amanah, Agustus 1987.

³⁹ Abdurrahman Wahid, *Islam Indonesia Menatap Masa Depan* (Jakarta: P3M, 1989).

⁴⁰ Abdurrahman Wahid, *"Islam and Pancasila: Development of A Religious Political Doctrine in Indonesia,"* makalah dalam Dialogue Group 9, Seoul, Korea, 25 Agustus 1990.

	A Religious Political Doctrine		Islam di Indonesia melalui penerimaan budaya lokal dan Pancasila	
9.	Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia	20 November 1992	Gus Dur menekankan pentingnya pluralitas dan peran Islam dalam menjaga harmoni antaragama melalui pendekatan pribumisasi	Seminar di UKSW, Salatiga. ⁴¹
10.	Ulama Akan Dikutuk, Jika	1996	Gus Dur menekankan bahwa ulama akan dikutuk jika bersikap pasif terhadap ketidakadilan. Ceramah ini mencerminkan semangat Pribumisasi Islam: kontekstual dan lokal ⁴²	PPWK PBNU, Kaliurang ⁴³

⁴¹ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 85–90.

⁴² GusDur.net. *Gus Dur: Ulama Akan Dikutuk, Jika...* (Ceramah Gus Dur tahun 1996) [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/@AbdulMoqsithGhazalimengaji>

⁴³ GusDur.net. (2018, 25 Januari). *Gus Dur: Ulama Akan Dikutuk, Jika...* YouTube. <https://www.youtube.com/@AbdulMoqsithGhazalimengaji>

11.	Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural	1998	Buku kompilasi pemikiran Gus Dur, memuat konsep Pribumisasi Islam dan keterkaitannya dengan demokrasi serta perlindungan kelompok minoritas	LKiS, Yogyakarta.
-----	--	------	---	-------------------

(Sumber tabel: penulis)

Pemikiran Gus Dur tentang pribumisasi Islam pada periode tahun 1980-2098, penting untuk menyoroti bagaimana beliau tidak hanya mengembangkan konsep ini dalam ranah akademik, tetapi juga aktif menyampaikannya kepada publik melalui berbagai media. Gus Dur memahami bahwa agar gagasannya dapat diterima dan dipahami secara luas, perlu adanya komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Melalui ceramah-ceramah, wawancara, dan tulisan-tulisannya di media massa, Gus Dur secara konsisten menyuarakan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal Indonesia. Ia menekankan bahwa Islam yang berkembang di Indonesia seharusnya mencerminkan kearifan lokal dan tidak terjebak dalam bentuk-bentuk formalistik yang kaku. Misalnya, dalam artikel "Salahkah Jika Dipribumisasikan?" yang diterbitkan di Majalah Tempo pada tahun

1983, Gus Dur mengkritik kecenderungan arabisasi dalam praktik keagamaan dan menekankan pentingnya adaptasi Islam terhadap konteks budaya Indonesia.

Selain itu, Gus Dur juga aktif dalam berbagai forum diskusi dan seminar, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menyampaikan pandangannya tentang Islam yang inklusif dan toleran. Dalam makalahnya yang berjudul "Islam and Pancasila: Development of A Religious Political Doctrine in Indonesia" yang disampaikan di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1990, Gus Dur menawarkan perspektif bahwa Islam dan Pancasila bukanlah dua entitas yang bertentangan.⁴⁴

Dengan usaha yang telah dilakukan, Gus Dur berhasil membawa konsep pribumisasi Islam ke dalam wacana publik, menjadikannya sebagai bagian integral dari diskusi tentang identitas keislaman di Indonesia. Upaya beliau ini tidak hanya memperkaya khazanah pemikiran Islam di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

C. Diskursus Pribumisasi Islam Pemikiran Abdurrahman Wahid Tahun 1998-2009

⁴⁴ "Pribumisasi Islam," *GusDur.Net*, <https://gusdur.net/pribumisasi-islam/>

Periode kedua (1998–2009) dimulai setelah kejatuhan Orde Baru dan ditandai oleh peran Gus Dur sebagai tokoh reformasi, politisi, dan Presiden Republik Indonesia (1999–2001). Pada masa ini, pemikiran Pribumisasi Islam memasuki babak baru karena Gus Dur memiliki akses langsung terhadap instrumen kekuasaan negara dan ruang demokratis yang lebih terbuka. Gagasan pribumisasi tidak lagi hanya hadir dalam forum-forum intelektual, tetapi mulai diwujudkan dalam kebijakan politik dan simbol-simbol kenegaraan, seperti pengakuan atas hak-hak minoritas, perlindungan budaya lokal, serta promosi pluralisme dan toleransi dalam kehidupan berbangsa. Fase ini juga ditandai dengan perluasan audiens pemikiran Gus Dur, karena ia tidak lagi berbicara hanya kepada kalangan pesantren atau akademik, tetapi juga kepada publik luas melalui jalur kenegaraan, organisasi sosial, dan media massa. Dengan demikian, pembagian dua fase ini mencerminkan transformasi peran dan pendekatan Gus Dur dalam menyuarakan gagasan Pribumisasi Islam, dari wacana kultural-intelektual menjadi praksis politik dan kebijakan publik.

Pada dekade 1990-an, pemikiran Gus Dur mengenai pribumisasi Islam mulai lebih terbuka dan berkembang pesat. Sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), Gus Dur menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, suku, agama, dan

bahasa yang sangat besar. Oleh karena itu, Gus Dur mengembangkan pemikiran Islam yang dapat diterima oleh semua kalangan, menghargai keberagaman, dan tidak terjebak dalam pemahaman Islam yang sempit dan puritan. Salah satu langkah signifikan dari perkembangan pemikiran Gus Dur pada masa ini adalah pengenalan konsep Islam Nusantara, yang menjadi pokok pikiran penting dalam pribumisasi Islam.⁴⁵

1. Islam Nusantara sebagai Konsep Dasar.

Pada awal 1990-an, Gus Dur mulai memperkenalkan konsep Islam Nusantara, yang ia definisikan sebagai bentuk Islam yang dapat diterima dalam konteks Indonesia, dengan mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Dalam pandangannya, Islam harus dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang sudah lama ada, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Islam Nusantara bukanlah suatu ajaran baru, tetapi lebih merupakan penafsiran kembali terhadap ajaran Islam yang selaras dengan kondisi Indonesia. Gus Dur berpendapat bahwa Islam tidak hanya dapat dipahami dengan cara yang berasal dari Timur Tengah,

⁴⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita* (Jakarta: Mizan, 1994), 23-30.

tetapi harus dipraktikkan sesuai dengan kondisi dan kebudayaan Indonesia.⁴⁶

2. Nilai-Nilai Lokal Indonesia dalam Islam.

Gus Dur menekankan bahwa nilai-nilai lokal Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati perbedaan, sangat relevan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Oleh karena itu, Gus Dur mendorong umat Islam di Indonesia untuk mempraktikkan Islam dengan mengedepankan nilai-nilai ini, yang menurutnya sudah ada dalam tradisi budaya Indonesia. Sebagai contoh, konsep gotong royong dalam budaya Indonesia sangat sejalan dengan prinsip Islam tentang kerjasama dalam kebaikan dan saling membantu sesama umat. Hal ini membuat Islam di Indonesia memiliki warna yang berbeda dengan Islam di negara-negara Timur Tengah yang lebih menekankan pada pemahaman yang lebih ortodoks.⁴⁷

3. Dialog Antarbudaya dan Agama.

Gus Dur juga mendorong dialog antarbudaya dan antaragama yang menjadi inti dari konsep pribumisasi Islam di

⁴⁶ Abdurrahman Wahid, *Islam Nusantara: Islam untuk Semua*, (Jakarta, Tempo, 2 Oktober 2000), 34.

⁴⁷ Abdurrahman Wahid, *Gus Dur: Politik Kebudayaan, Dinamika Islam Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2001), hlm 40

Indonesia. Dengan keberagaman yang ada, Indonesia membutuhkan Islam yang tidak hanya dapat mengakomodasi perbedaan dalam ajaran agama, tetapi juga menghargai keragaman dalam budaya, suku, dan tradisi. Gus Dur selalu mengingatkan pentingnya toleransi dan pluralisme sebagai nilai dasar dalam ajaran Islam Nusantara.

4. Pentingnya Islam yang Moderat dan Inklusif

Gus Dur berpendapat bahwa Islam di Indonesia harus berbasis pada nilai-nilai moderat dan inklusif, di mana ajaran agama harus dipraktikkan dengan cara yang mengakomodasi keberagaman dan tidak menutup diri terhadap perbedaan. Gus Dur menentang pandangan yang mempersempit pemahaman Islam dengan menganggap bahwa hanya satu cara yang benar untuk mengamalkan ajaran agama. Dalam pandangannya, Indonesia membutuhkan bentuk Islam yang terbuka, ramah, dan menghargai perbedaan, baik dalam konteks agama, budaya, maupun politik.⁴⁸

Berikut publikasi diskursus pribumisasi Islam sejak tahun 1998-2009.

Tabel 3.2, Diskursus dalam bentuk buku

⁴⁸ Abdurrahman Wahid, "*Islam Nusantara: Islam untuk Semua*," Gusdurian <https://www.gusdurian.or.id>, diakses pada 15 Februari 2025.

No	Judul	Tahun Terbit	Penerbit	Uraian Singkat
1.	Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural	1998	LkiS	Membahas konsep pribumisasi Islam secara mendalam.
2.	Mengurai Hubungan Islam dan Negara	1999	Grasindo	Mengupas hubungan Islam dan negara serta konteks lokal.
3.	Tuhan Tidak Perlu Dibela	1999	LkiS	Esai-esai Gus Dur tentang Islam dan budaya lokal. ⁴⁹
4.	Islamku, Islam Anda, Islam Kita	2006	The Wahid Institute	Menyoroti pluralitas dan pribumisasi Islam di Indonesia. ⁵⁰
5.	Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan	2001	Desantara	Interaksi negara, agama, dan budaya lokal. ⁵¹
6.	Islam Kosmopolitan	2007	The Wahid Institute	Pandangan Islam inklusif dan menghargai keragaman budaya. ⁵²

(Sumber: Penulis)

Tabel 3.3, Wawancara dan Artikel Media

⁴⁹ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKiS, 1999)

⁵⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)

⁵¹ Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001)

⁵² Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007)

No	Judul	Tahun	Media	Isi Utama
1.	Nasihat KH Abdurrahman Wahid: Islam, Budaya dan Pribumisasi Agama	1998	Aktual.com	Menekankan pentingnya budaya lokal dan bahaya arabisasi. ⁵³

(Sumber: Penulis)

Tabel 3.4 Video dan Dokumentasi Visual

No	Judul	Tahun	Jenis	Isi Utama
1.	Ceramah Gus Dur tentang Islam dan Budaya Lokal	1998–2009	Ceramah	Islam tidak harus identik dengan budaya Arab, tapi membumi. ⁵⁴
2.	Wawancara Gus Dur tentang Pribumisasi Islam	2000-an	Wawancara	Islam dapat beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi. ⁵⁵

(Sumber: Penulis)

Pada era 1998–2009, Gus Dur aktif menyebarluaskan ide pribumisasi Islam melalui berbagai saluran. Ia menulis buku-buku seperti *Tabayun Gus Dur: Pribumisasi Islam, Hak Minoritas, Reformasi Kultural* (1998) dan *Islamku, Islam Anda, Islam Kita* (2006),

⁵³ “Nasihat KH Abdurrahman Wahid: *Islam, Budaya dan Pribumisasi Agama*,” *Aktual.com*, diakses 13 Mei 2025, <https://www.aktual.com>.

⁵⁴ KH Abdurrahman Wahid, “*Ceramah Gus Dur tentang Islam dan Budaya Lokal*,” *GusDur.net*, YouTube video, diakses 13 Mei 2025, <https://www.youtube.com/@gusdurnet>

⁵⁵ KH Abdurrahman Wahid, “*Wawancara Gus Dur tentang Pribumisasi Islam*,” NU Channel, YouTube video, diakses 13 Mei 2025, <https://www.youtube.com/@nuchannel>

yang membahas secara mendalam konsep Islam yang berakar pada budaya lokal Indonesia. Selain itu, Gus Dur juga sering tampil dalam ceramah, wawancara, dan diskusi publik, baik di dalam maupun luar negeri, untuk menyampaikan pandangannya tentang pentingnya Islam yang menghargai keberagaman budaya dan tradisi lokal.⁵⁶

Gus Dur juga memanfaatkan media massa sebagai platform untuk menyampaikan pemikirannya. Melalui artikel-artikel di berbagai majalah dan surat kabar, ia mengkritik kecenderungan arabisasi dan menekankan perlunya Islam yang membumi dan sesuai dengan konteks Indonesia. Melalui pemikiran dan karyanya, Gus Dur telah memberikan kontribusi besar untuk membentuk wajah Islam Indonesia yang damai, hal ini berakar pada nilai-nilai kebudayaan.

⁵⁶ M. Husnaini, "Pribumisasi Islam Ala Gus Dur," *NU Online*, 3 Juni 2007, <https://nu.or.id/pustaka/pribumisasi-islam-ala-gus-dur>